



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TA. 2024**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
KETENAGAKERJAAN - KOTA SIBOLGA**

JL. COM YOS SUDARSO NO. 10, KOTA SIBOLGA

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan di Kota Sibolga secara transparan dan akuntabel, maka telah diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur melalui Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

Adapun maksud dan tujuan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang konkret dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Kami menyadari adanya kekurangan dalam laporan ini, oleh karena itu kami berharap mendapat masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Laporan Kinerja di masa yang akan datang, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi serta dapat menjadi referensi untuk meningkatkan upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan kota Sibolga di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Sibolga, 2025
**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA,**



RINA LAMRENTA LUMBAN TOBING, S.H., M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19790302 200212 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan pihak yang diwajibkan menyampaikan LKjIP adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkuman kerja instansi. Yang mana, itu nantinya bisa menjadi perbandingan antara hasil yang sesungguhnya dan hasil rencana anggaran yang telah ada sebelumnya. Laporan ini mempermudah manajemen dalam melakukan pengendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

2. Penjelasan Umum organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi serta Tugas dan Fungsi, Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga adalah sebuah instansi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Sibolga.

Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan pembangunan dibidang Pengembangan Koperasi, Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM serta Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

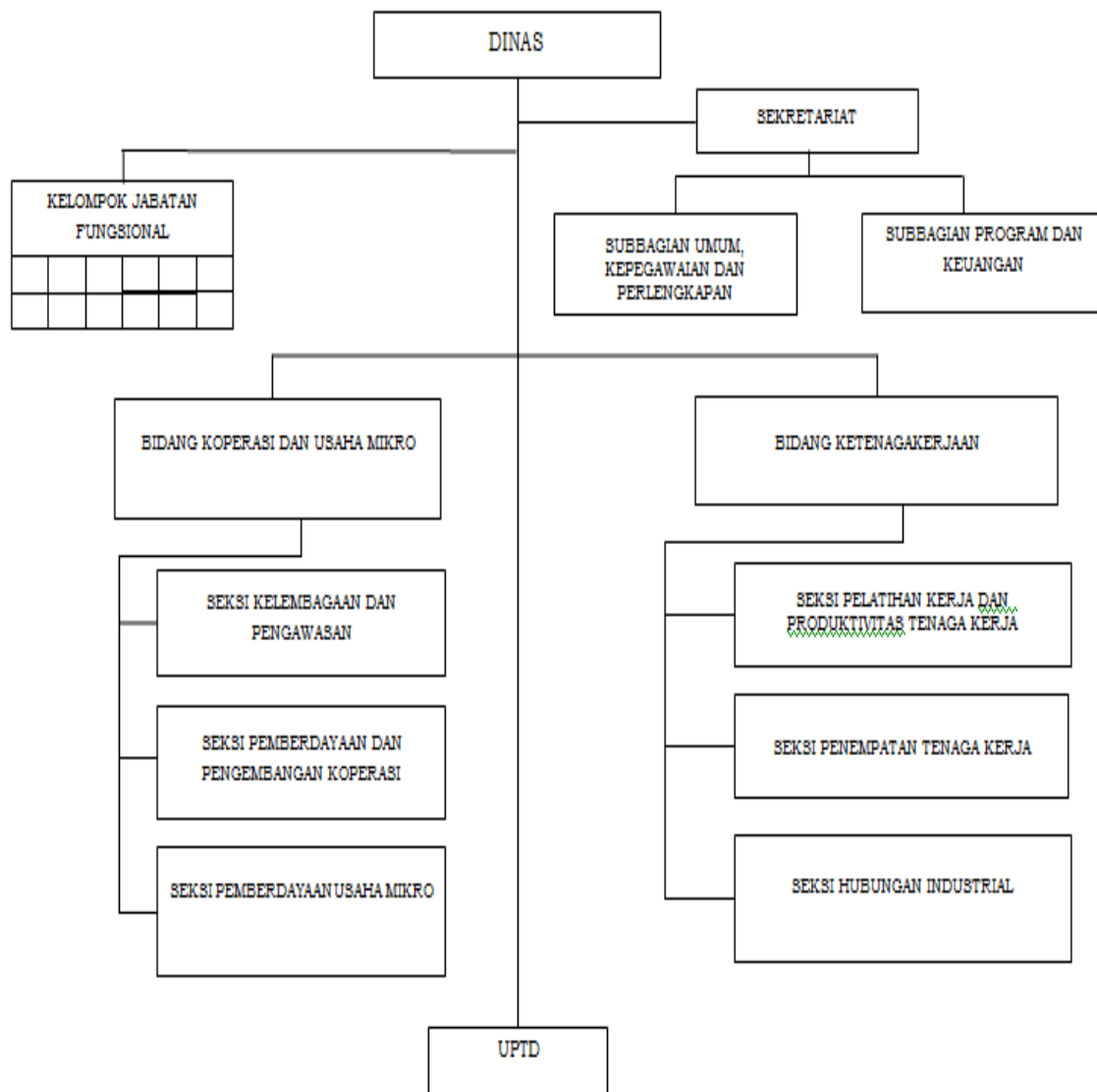
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan; pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan;
4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan.

2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 9 Tahun 2017 Tanggal 12 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga, Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh kepala dinas, dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Sibolga melalui Sekretaris Daerah. Adapun Struktur Organisasi Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Struktur Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga



SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. Bidang Ketenagakerjaan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
 - b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro.
 - c. Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Hubungan Industrial.

2.2 Anggaran Tahun 2024

Ringkasan Anggaran Belanja (APBD) Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan tahun 2024 adalah sebagaimana berikut ini ;

Tabel 1.1
Ringkasan Anggaran APBD Kantor Dinas Koperasi, UKM dan
Ketenagakerjaan Kota Sibolga TA 2024

Kode Rekening	URAIAN	Anggaran Belanja (Rp)
5	BELANJA DAERAH	4.424.198.783,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.413.031.883,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.996.819.467,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.416.212.415,00
5.2	BELANJA MODAL	11.166.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.166.900,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	

Sumber : Diskopukmnaker 2024 (Data sebelum Audit)

3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 9 Tahun 2017 Tanggal 12 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga;

4. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

- KATA PENGANTAR
- IKHTISAR EKSEKUTIF
- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Penjelasan Umum organisasi
 - 2.1 SOTK atau Struktur Organisasi
 - 2.2 Anggaran Tahun n
3. Dasar Hukum
4. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kerja Tahun n
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun n
- 2.4 Metode Pengukuran/Manual Indikator Kinerja
- 2.5 Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun n
2. Lain-lain yang dianggap perlu seperti :
 - a. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun n (jika Ada)
 - b. Perjenjangan Kinerja atau Cascading Kinerja
 - c. Manual Indikator/ Kamus Indikator Kinerja
 - d. Surat Evaluasi Tahun n-1
 - e. Tanggapan /Tindaklanjut Evaluasi Kinerja Tahun n-1
 - f. Prestasi /Penghargaan Tahun n (Jika Ada)

- g. Inovasi Tahun n (Jika Ada)
- h. Pernyataan Telah Direviu
- i. Dan Lain-lain yang Dianggap Perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga Tahun 2021-2026 telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis (RENSTRA) yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Sibolga 2021-2026. Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM
dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menumbuhkan wirausaha kreatif yang menghasilkan kerajinan tangan yang berkualitas sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.	Peningkatan Daya Saing wirausaha ekonomi kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif Binaan yang Tumbuh	5 UMKM	5 UMKM	5 UMKM	5 UMKM	5 UMKM
2	Meningkatkan Kualitas Produk guna memperluas jangkauan Pasar UMKM Kota Sibolga	Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Swalayan Skala Nasional	Fasilitasi Izin Produk PIRT dan Sertifikat Halal	20 Produk	20 Produk	20 Produk	20 Produk	20 Produk
3	Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi.	Peningkatan jumlah Koperasi Aktif	Persentase Pelaksanaan RAT Koperasi	40%	42%	45%	47%	50%
4	Terlaksananya pengawasan terhadap perusahaan dalam hal pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan K3	30%	40%	50%	60%	70%
5	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja guna memenuhi kebutuhan Ekonomi Global	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70%	70%	75%	75%	80%

Sumber : Renstra Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan periode 2021-2026

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD maka RPJMD sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, indikator dan target kinerja. Penetapan indikator kinerja urusan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Namun dalam hal ini ada terdapat beberapa indikator yang tidak di targetkan karena keterbatasan ruang lingkup dan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga. Indikator Kinerja Utama kantor Dinas, Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
				2024
1.	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Persentase Koperasi Aktif	73,45%
			Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	73,45%
			Persentase BPR/LKM Aktif	-
			Persentase Usaha Mikro dan Kecil	100%
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	5
			Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun	-
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	80%
			Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan	50%
			Keselamatan dan Perlindungan	50%
			Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi Peserta BPJS	67%
			Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah	-

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
				2024
			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100%
			Besaran Pengujian Peralatan diperusahaan	-
			Besaran Tenagakerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%
			Besaran tenagakerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	75%
			Besaran tenagakerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	75%

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja yang disusun pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Pendanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga baik rutin maupun khusus bersumber dari dana APBD Kota Sibolga, APBD Provinsi dan APBN Pusat atau yang disebut dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Pelaksanaan pengelolaan dana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga Tahun 2021-2026 telah disusun berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga mengacu pada perencanaan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

Rekapitulasi Rencana Kerja Tahun 2024 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
1	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatkan Peluang berusaha dan membuka lapangan kerja bagi para pencari kerja		%	75%
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	25
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	30
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Perusahaan	50
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	200
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
2	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatkan Peluang berusaha dan membuka lapangan kerja bagi para pencari kerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	3
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1
			Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	50
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	200
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	50
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	50
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	250

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sama dengan target yang ada dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan tahun 2021-2026. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Daya Saing wirausaha ekonomi kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif Binaan yang Tumbuh	5 UMKM
2	Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Swalayan Skala Nasional	Fasilitasi Izin Produk PIRT dan Sertifikat Halal	20 Produk
3	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Persentase Pelaksanaan RAT Koperasi	42%
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3	30%
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70%
6	Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	A
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM OPD	A

Sumber : Lampiran Perjanjian Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan (terlampir)

Adanya perubahan perjanjian kinerja tidak merubah target dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan sebagai berikut ;

Tabel 2.3.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Daya Saing wirausaha ekonomi kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif Binaan yang Tumbuh	5 UMKM
2	Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Swalayan Skala Nasional	Fasilitasi Izin Produk PIRT dan Sertifikat Halal	20 Produk
3	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Persentase Pelaksanaan RAT Koperasi	42%
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3	30%
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70%
6	Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	A
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM OPD	A

Sumber : Lampiran Perubahan Perjanjian Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan (terlampir)

2.4 Metode Pengukuran/Manual Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh OPD. Agar pencapaian sasaran-sasaran tersebut dapat lebih terukur maka dituangkan ke dalam indikator-indikator kinerja. Keberhasilan dari pencapaian sasaran-sasaran tersebut dilihat dari pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian visi, misi, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua yaitu:

1. Jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka gunakan rumus pendek.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- (2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2.5 Perencanaan Anggaran

Besaran Anggaran tahun 2024 di awal pelaksanaan untuk Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan adalah Rp. **5.083.646.238,-** dan sampai akhir perubahan (pergeseran ke-5) di bulan Nopember 2024 menjadi sebesar Rp.**4.424.1981.783,-** atau berkurang sebanyak **Rp.659.447.455,- (14,91 %)**. Anggaran sebelum dan sesudah perubahan APBD Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan tercantum sebagai berikut :

Tabel 2.5.1
APBD sebelum dan Sesudah perubahan TA 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	APBD			
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			466.160.151		316.251.181
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		75%	207.946.641	75%	79.503.231
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		100%	207.946.641	100%	79.503.231
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	120 Orang	207.946.641	25 Orang	79.503.231
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		60%	139.502.530	60%	139.502.530
2	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		70%	139.502.530	70%	139.502.530
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	30 Orang	139.502.530	30 Orang	139502.530
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		80%	118.710.980	80%	97.534.320
3	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	47.246.660	100%	26.070.000
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Teraftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	50 Perusa haan	47.246.660	50 Perusa haan	26.070.000
4	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		100%	71.464.320	100%	71.464.320

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	APBD			
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200 Orang	71.464.320	200 Orang	71.464.320
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			4.617.486.087		4.107.947.602
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		83	4.217.489.797	83	3.770.322.382
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.181.058.332	100%	2.996.819.467
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.181.058.332	21 Orang/bulan	2.996.819.467
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	45.650.000	100%	25.145.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	23.650.000	1 Paket	14.145.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	22.000.000	2 Orang	11.000.000
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	515.553.340	100%	345.576.290
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.240.800	12 Paket	4.849.700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	106. 985.800	12 Paket	73.316.100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	29.947.800	12 Paket	20.064.300
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.193.840	12 Paket	20.898.790
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.119.500	12 Paket	10.793.900
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.653.600	12 Dokumen	3.116.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	319.412.000	50 Laporan	212.537.000
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 paket	11.166.900	3 paket	11.166.900

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	APBD			
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 paket	11.166.900	3 paket	11.166.900
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	346.885.225	100%	319.915.225
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000	12 Laporan	6.030.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.485.225	12 Laporan	85.485.225
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	252.400.000	12 Laporan	228.400.000
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	117.176.000	100%	71.699.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	80.316.000	10 Unit	53.799.500
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	26.860.000	12 Unit	17.900.000
V	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			21.365.400		
11	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		12 Unit Usaha	21.365.400		
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit Usaha	40.415.520		
VI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		74%	58.556.470	74%	40.416.120
12	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		100%	58.556.470	100%	40.416.120
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50 Unit Usaha	58.556.470	50 Unit Usaha	40.416.120

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	APBD			
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7
VII	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		72%	21.658.500	72%	21.658.500
13	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	21.658.500	1 Dokumen	21.658.500
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha	21.658.500	50 Unit Usaha	21.658.500
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		73,45%	235.457.700	73,45%	238.540.600
14	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		100%	235.457.700	100%	238.540.600
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha -	61.446.030	50 Unit Usaha	53.346.030
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		50 Unit Usaha	24.478.700	50 Unit Usaha	32.578.100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			149.532.970		152.616.470
		Total :		5.083.646.238		4.424.198.783

Sumber : DPA APBD dan P-APBD Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan TA 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan tahun 2021-2026. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 3.1.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Daya Saing wirausaha ekonomi kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif Binaan yang Tumbuh	5 UMKM	5 UMKM	100%	Baik
2	Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Swalayan Skala Nasional	Fasilitasi Izin Produk PIRT dan Sertifikat Halal	20 Produk	17 Produk	85%	Baik
3	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Persentase Pelaksanaan RAT Koperasi	42%	42%	100%	Baik
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3	30%	30%	100%	Baik
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70%	70%	100%	Baik
Nilai rata-rata Indikator :					97%	Sangat Tinggi

Dari perhitungan Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan tahun 2024 dengan rerata **97%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		% Capaian
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Daya Saing wirausaha ekonomi kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif Binaan yang Tumbuh	5 UMKM	5 UMKM	5 UMKM	5 UMKM	5 UMKM	80,0%
2	Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Swalayan Skala Nasional	Fasilitasi Izin Produk PIRT dan Sertifikat Halal	20 Produk	20 Produk	15 Produk	20 Produk	17 Produk	72,0%
3	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Persentase Pelaksanaan RAT Koperasi	42%	48%	42%	42%	42%	77,7%
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3	30%	27%	30%	30%	30%	46,8%
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70%	100%	70%	70%	70%	83,8%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja berhasil dengan baik, Tahun 2023 terjadi penurunan dalam pengajuan PIRT dan Sertifikat Halal namun di tahun 2024 pada indikator Fasilitasi Izin Produk PIRT dan Sertifikat Halal meningkat kembali. Hasil diskusi dengan pegawai yang menangani ini, biasanya pelaku usaha banyak yang tidak melaporkan hasil pendaftaran baik PIRT maupun sertifikat halal ke Dinas Koperasi dan OPD.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Target Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Daya Saing wirausaha ekonomi kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif Binaan yang Tumbuh	20	25	80%
2	Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Swalayan Skala Nasional	Fasilitasi Izin Produk PIRT dan Sertifikat Halal	72	100	72%
3	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Persentase Pelaksanaan RAT Koperasi	43,5%	44,8%	97,1%
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3	29,25%	50%	58,5%
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	77.5%	74%	104,7%

Dari Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi diatas dapat dilihat bahwa semua Capaian memiliki progres kemajuan dalam pelaksanaannya. Bahkan Indikator Kinerja Pelatihan Berbasis Kompetensi sudah melebihi target capaian. Diharapkan, pelaksanaan tahun anggaran tahun depan semua target Capaian ini dapat di tuntaskan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga.

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi
/Kabupaten/Kota

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Daya Saing wirausaha ekonomi kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif Binaan yang Tumbuh	5 UMKM	NIHIL	NIHIL
2	Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Swalayan Skala Nasional	Fasilitasi Izin Produk PIRT dan Sertifikat Halal	17 Produk		
3	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Persentase Pelaksanaan RAT Koperasi	42%		
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3	30%		
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70%		

Tabel 3.1.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta
alternatif Solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Daya Saing wirausaha ekonomi kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif Binaan yang Tumbuh	5 UMKM	5 UMKM	100%	Pertumbuhan didukung tersedianya sumberdaya yang tersedia	Pelatihan dalam meningkatkan kreatifitas pelaku usaha dan dukungan pemerintah masih sangat diperlukan
2	Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Swalayan Skala Nasional	Fasilitasi Izin Produk PIRT dan Sertifikat Halal	20 Produk	17 Produk	85%	pengurusan Izin produk PIRT maupun sertifikat halal oleh pelaku usaha ke instansi yang dimaksud, hasil tidak wajib dilaporkan pelaku usaha ke OPD	Pendampingan Usaha Mikro akan terus dilakukan dan mengingatkan ijin dan sertifikat halal dicantumkan di lokasi usaha
3	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Persentase Pelaksanaan RAT Koperasi	42%	42%	100%	Banyaknya koperasi yang mati suri	Pembinaan dan pelatihan tetap dilakukan OPD
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3	30%	30%	100%	Pada umumnya Perusahaan tetap berusaha berfokus penerapan K3	Monitoring OPD ke pihak perusahaan terus dilakukan
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70%	70%	100%	Tingginya minat calon tenaga kerja dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (skill)	Pelatihan kompetensi tetap dilakukan pada tenaga kerja atau masyarakat

Tabel 3.1.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp.)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Daya Saing wirausaha Ekonomi Kreatif	5 UMKM	5 UMKM	100%				
2	Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Swalayan Skala Nasional	20 Produk	17 Produk	85%				
3	Peningkatan jumlah koperasi aktif	42%	42%	100%	40.416.120,00	35.939.600,00	88,92	4.476.520,00
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	30%	30%	100%	71.464.320,00	54.436.500 ,00	76,17	17.027.820,00
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	70%	70%	100%	79.503.231,00	73.236.400,00	92,12	6.266.831,00
	JUMLAH TOTAL :				344.000.141,00	267.416.700,00	81,31	76.563.441,00

Dari Tabel 3.1.6, Total Anggaran sebanyak Rp.**344.000.141,00** digunakan untuk merealisasikan Lima Tujuan/Sasaran yang ditetapkan. Rerata pencapaian target Indikator Kinerja sebesar **97,0%**, dengan nilai capaian Sangat Tinggi, pencapaian ini dengan menyerap anggaran sebesar **81,31%**. Dalam hal ini, Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan dapat melakukan efisiensi belanja sebesar Rp.**76.583.441**.

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Peningkatan Daya Saing wirausaha ekonomi kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif Binaan yang Tumbuh	5 UMKM	5 UMKM	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase	68,02	Menunjang	Pelaksanaan Berjalan Baik
2	Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Swalayan Skala Nasional	Fasilitasi Izin Produk PIRT dan Sertifikat Halal	20 Produk	17 Produk	85%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase	100,00	Menunjang	Sangat Tergantung Pelaku Usaha
3	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Persentase Pelaksanaan RAT Koperasi	42%	42%	100%	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase	88,92	Menunjang	Pelaksanaan Berjalan Baik
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3	30%	30%	100%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase	76,17	Menunjang	Pelaksanaan Berjalan Baik
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70%	70%	100%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase	92,12	Menunjang	Pelaksanaan Berjalan Baik

3.2 Realisasi Anggaran

Penggunaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan apabila diperinci dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis/ Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(4/5)*100
1	Peningkatan Daya Saing wirausaha Ekonomi Kreatif			
2	Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Swalayan Skala Nasional			
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	238.540.600	188.827.300	79,16
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	238.540.600	188.827.300	79,16
3	Peningkatan jumlah koperasi aktif			
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	40.416.120,00	35.939.600,00	88,92
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	40.416.120,00	35.939.600,00	88,92
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja			
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	71.464.320	54.436.500	76,17
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	71.464.320	54.436.500	76,17
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja			
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	79.503.231	73.236.400	92,12
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	79.503.231	73.236.400	92,12

Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan sebagai salah satu OPD /Instansi pada kantor Walikota Sibolga memiliki anggaran dari APBD Kota Sibolga yang digunakan untuk operasional dinas dan belanja rutin dinas. APBD terakhir adalah Perubahan APBD (P-APBD) yang disahkan bulan Nopember 2024 dimana anggaran sebelumnya sebesar Rp.5.083.646.238,00 menjadi Rp. 4.424.198.783,00 atau berkurang sebesar Rp. 659.447.455 (14,91%).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga Tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Pada Tahun 2024 ini, Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga berhasil mencapai kinerja pada skala nilai Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian kinerja 97,0%. Pencapaian ini adalah berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga Tahun 2024 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibolga, Pebruari 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA,**



RINA LAMRENTA LUMBANTOBING, S.H, M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19790302 200212 2 003

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RINA LAMRENTA LUMBANTOBING, S.H., M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. JAMALUDDIN POHAN

Jabatan : WALI KOTA SIBOLGA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, Januari 2024

Pihak Kedua,
WALI KOTA SIBOLGA,

H. JAMALUDDIN POHAN

Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA,

RINA LAMRENTA LUMBANTOBING, S.H., M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19790302 200212 2 003

PERJANJIAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Dasar Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Daya Saing wirausaha ekonomi kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif Binaan yang Tumbuh	5 UMKM
2	Peningkatan Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Swalayan Skala Nasional	Fasilitasi Izin Produk PIHT dan Sertifikat Halal	20 Produk
3	Peningkatan Penataan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	42%
4	Meningkatnya Tenaga Kerja Perlindungan	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3	30%
5	Meningkatnya Tenaga Kerja Produktivitas	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70%
6	Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	A
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM OPD	A

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 207.946.641,-	APBD
2.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 139.502.530,-	APBD
3.	Hubungan Industrial	Rp. 118.710.980,-	APBD
4.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.217.489.797,-	APBD
5.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 58.556.470,-	APBD
6.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 21.658.500,-	APBD
7.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 43.908.100,-	APBD
8.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 235.457.700,-	APBD
JUMLAH.....		Rp. 5.083.646.238,-	

Sibolga, Januari 2024

Pihak Kedua,
WALI KOTA SIBOLGA,

H. JAMALUDDIN POHAN

Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA,

RINA LAMRENTA LUMBANTOBING, S.H., M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19790302 200212 2 003

Lampiran 2. Perubahan Perjanjian Kinerja 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RINA LAMRENTA LUMBANTOBING, S.H., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : H. JAMALUDDIN POHAN
Jabatan : WALI KOTA SIBOLGA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, Januari 2024

Pihak Kedua,
WALI KOTA SIBOLGA,



H. JAMALUDDIN POHAN

Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA,



RINA LAMRENTA LUMBANTOBING, S.H., M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19790302 200212 2 003

PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Daya Saing wirausaha ekonomi kreatif	Jumlah Ekoromi Kreatif Binaan yang Tumbuh	5 UMKM
2	Peningkatan Produk UMKM Binaan yang menembus Marketplace Online dan Sebelasan Skala Nasional	Facilitasi Izin Produk PIRT dan Sertifikat Halal	20 Produk
3	Peningkatan Penataan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	42%
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3	30%
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70%
6	Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	A
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM OPD	A

ECIL DAN
JAAN KOTA

aget
4
MKM
Produk
2%
0%
0%
A
A

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 79.503.231,-	P-APBD
2.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 139.213.630,-	P-APBD
3.	Hubungan Industrial	Rp. 97.534.320,-	P-APBD
4.	Perumjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.770.322.382,-	P-APBD
5.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 40.416.120,-	P-APBD
6.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 21.658.500,-	P-APBD
7.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 37.010.000,-	P-APBD
8.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 238.540.600,-	P-APBD
JUMLAH.....		Rp. 4.424.198.783,-	

Sibolga, 21 November 2024

Pihak Kedua,
WALI KOTA SIBOLGA,



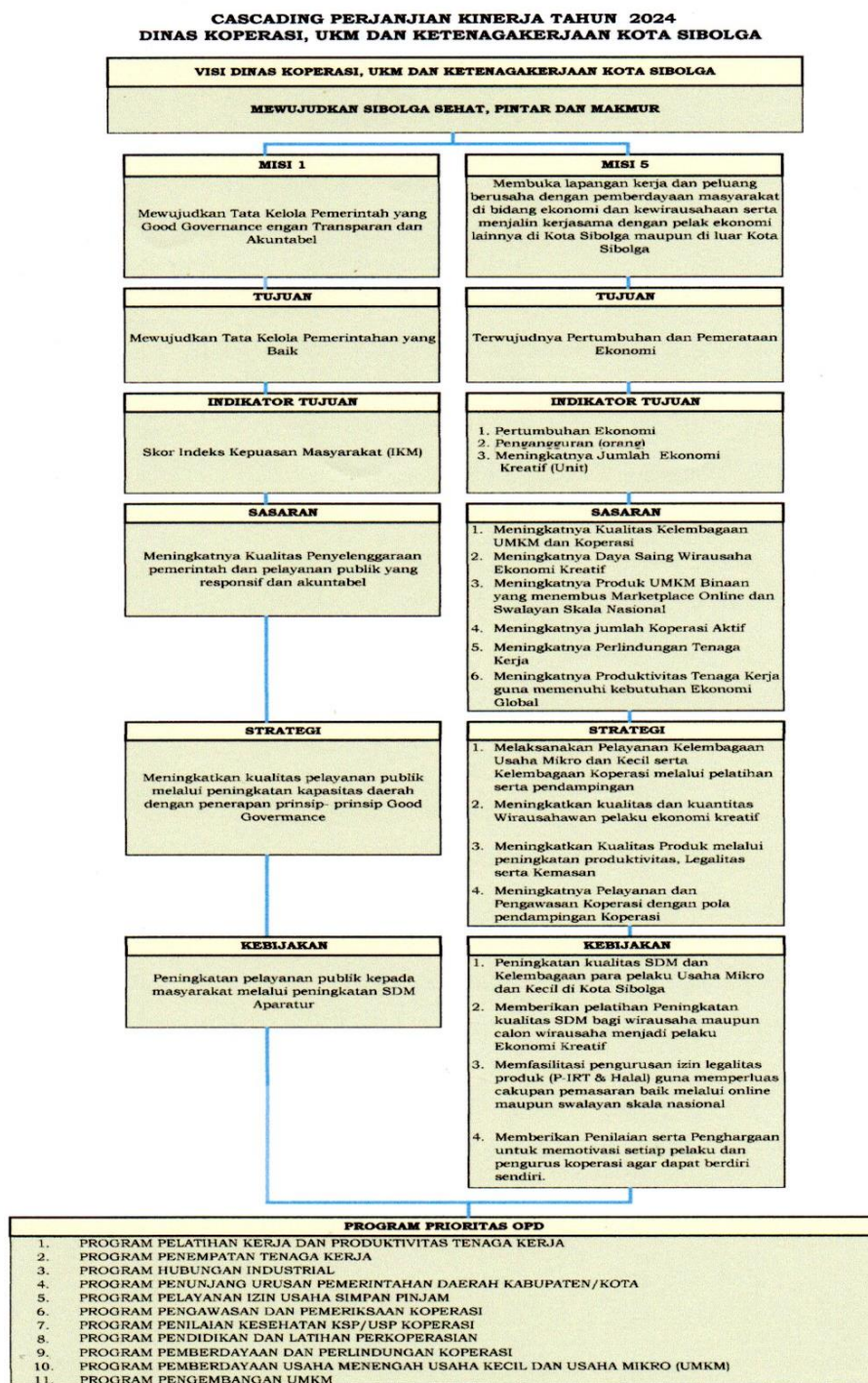
H. JAMALUDDIN POHAN

Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA,



RINA LAMRENTA LUMBANTOBING, S.H.; M.M
PEMBINA TK. I
NIP. 19790302 200212 2 003

Lampiran 3. Perjenjangan Kinerja atau Cascading Kinerja



INDIKATOR PROGRAM URUSAN	
1.	Persentase Koperasi Aktif
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil
3.	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Binaan yang tumbuh
4.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)
5.	Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan
6.	Keselamatan dan Perlindungan
7.	Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi Peserta BPJS
8.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan
9.	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
1.1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
2.1.	Pelayanan antar Kerja
3.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.1.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
4.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
4.1.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
6.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
9.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10.3.	Pemeliharaan Mebel
11.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
11.1.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
12.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
12.1.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
13.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
13.1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
14.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
14.1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
15.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
15.1.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
15.2.	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
15.3.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan